

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk komunikasi yang terjadi dalam organisasi KPU RI periode 2012-2017 adalah semua bentuk komunikasi berdasarkan aliran pesannya, yaitu ; pertama, komunikasi vertikal, adalah komunikasi yang terjadi antara komisioner dengan sekretariat KPU dan/atau komunikasi yang terjadi antara sesama sekretariat KPU namun berada pada hirarki jabatan yang berbeda, kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar sesama komisioner KPU dan/atau komunikasi antara sesama sekretariat KPU yang berada pada hirarki jabatan yang sama, ketiga, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komisioner divisi tertentu dengan pegawai di salah satu biro yang bukan merupakan divisi yang dibidangi oleh komisioner bersangkutan, dan/atau komunikasi yang terjadi antara salah seorang pegawai KPU di salah satu biro dengan pegawai biro lain, namun memiliki hirarki jabatan yang berbeda.
2. Masih ditemukan beberapa kesalahpahaman komunikasi yang menjadi hambatan dan gangguan komunikasi internal, di antaranya hambatan status, hambatan kerangka berpikir, dan hambatan psikologis, yaitu :
  - a. Arus pesan yang tidak sesuai dengan jenjang hirarki menyebabkan staf bingung dalam melakukan pekerjaan;
  - b. Rasa kurang senang karena adanya pejabat baru yang tiba-tiba dilantik, berasal dari luar organisasi KPU;
  - c. Pimpinan KPU mengharapkan staf sekretariat memiliki kemampuan yang lebih dari cukup dalam memahami dan melaksanakan pekerjaan kepemiluan, namun kenyataannya belum semua staf memiliki kemampuan tersebut;

- d. Pimpinan KPU seringkali mengeluarkan kebijakan yang mendadak, tanpa menyadari segala sesuatu yang diputuskan akan berpengaruh terhadap pekerjaan sekretariat;
- e. Pembagian jumlah pegawai yang tidak merata sesuai kebutuhan pekerjaan pada biro-biro, sehingga mengakibatkan kelebihan beban pekerjaan pada biro tertentu. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya gangguan komunikasi pada saat-saat tertentu;
- f. Terdapat perbedaan jam kerja antara komisioner dan sekretariat;
- g. Penggunaan bahasa yang berlebihan dan terlalu keras akan menyebabkan komunikasi cenderung menghinal sehingga proses koordinasi menjadi terhambat.

Secara keseluruhan, praktek komunikasi internal organisasi KPU RI telah berlangsung baik, terbukti dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu yang lebih baik yang ditandai dengan beberapa penghargaan yang diterima KPU selama periode 2012-2017. Meskipun begitu, beberapa hambatan komunikasi yang ditemukan perlu dicegah dan diurai untuk menciptakan komunikasi internal organisasi ke depan semakin efektif.

## 6.2. **Saran**

### 6.2.1. **Saran Akademis**

Tuntutan publik terhadap organisasi pemerintah untuk berubah ke arah yang lebih baik semakin tinggi. KPU RI sebagai organisasi pemerintah tidak bisa mengabaikan tuntutan tersebut dan harus mampu menggerakkan seluruh stafnya untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik. Setiap anggota organisasi harus memiliki hubungan yang baik dan cair dengan sesama anggota organisasi lainnya. Hubungan yang kaku akan membuat kualitas pekerjaan menjadi rendah. Dibukanya kajian Tata Kelola Pemilu di beberapa universitas di seluruh Indonesia berkat kerjasama KPU dengan universitas tersebut adalah langkah yang sangat tepat dalam meningkatkan pengetahuan kepemiluan personil sekretariat KPU di seluruh Indonesia. Namun, satu hal yang luput dalam kajian Tata Kelola Pemilu adalah mengelola kemampuan komunikasi penyelenggara pemilu. Pengetahuan komunikasi yang selama ini diberikan adalah komunikasi yang bersifat eksternal.

Karena itu perlu ditambahkan kajian tentang komunikasi yang bersifat internal, dan untuk melengkapi kajian ini, penelitian berikutnya dapat membuat kajian dari sudut pandang komunikasi antar pribadi. Tidak hanya di bidang Tata Kelola Pemilu, namun kebutuhan kajian akademis yang dapat membantu seluruh organisasi pemerintah dalam melaksanakan komunikasi organisasi mereka sangat ditunggu-tunggu. Selama ini kita ketahui kajian kehumasan pun lebih fokus pada menjaga citra organisasi (komunikasi eksternal), maka berdasarkan hasil penelitian ini akademisi diharapkan memperbanyak kajian yang membuat organisasi pemerintah menyadari pentingnya mengembangkan dan memelihara komunikasi internal organisasi.

### 6.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran praktis yang dapat penulis usulkan kepada KPU RI untuk memaksimalkan peran komunikasi internal sehingga Tata Kelola Pemilu KPU menjadi lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Penting untuk mempertimbangkan adanya sebuah sub bagian yang menangani komunikasi internal dan eksternal secara khusus dengan personil yang memiliki latar belakang atau memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi organisasi.
2. Pimpinan KPU RI sebagai komunikator selain menuntut bawahan sebagai komunikasikan melaksanakan semua instruksi seperti yang diinginkan, juga harus bersedia menjadi pendengar yang baik sehingga terjadi komunikasi timbal balik.
3. Meninjau kembali struktur organisasi dan mengupayakan agar pembagian beban kerja menjadi rata.
4. Mengutamakan personil KPU dalam mengisi jabatan yang kosong.
5. Membangun jalur komunikasi secara berjenjang/vertikal sehingga semua instruksi/perintah dari komisioner dapat diketahui oleh pimpinan sekretariat, dan staf merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.